

Evektifitas Pengelola Rusunawa Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ainul Husna¹, M. Rosihan², Rahmatul Irfan³, Nurul Hidayatiin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Mataram

*Corresponding author

E-mail: ainulhusna155@gmail.com*

Article History:

Received: Juni, 2024

Revised: Juni, 2024

Accepted: Juni, 2024

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat. Evaluasi ini mencakup tiga aspek utama: operasional pengelolaan, kepuasan penghuni, serta pemeliharaan dan perawatan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei terhadap penghuni Rusunawa dan wawancara dengan pengelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi digital yang diterapkan telah memudahkan proses pendaftaran, pembayaran sewa, dan penanganan keluhan. Namun, masih terdapat kendala teknis yang mempengaruhi kecepatan respons terhadap keluhan penghuni. Mayoritas penghuni merasa cukup puas dengan fasilitas yang disediakan, tetapi ada keluhan signifikan terkait ketersediaan air bersih dan pemeliharaan fasilitas umum seperti lift dan tangga darurat. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya mengakibatkan beberapa pekerjaan pemeliharaan tertunda. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa meskipun pengelolaan Rusunawa telah berjalan cukup baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan di berbagai aspek guna mencapai efektivitas yang lebih optimal. Rekomendasi yang diberikan meliputi perbaikan sistem administrasi, peningkatan layanan penghuni, optimalisasi anggaran dan sumber daya, pelatihan dan pengembangan staf, serta partisipasi penghuni dalam program pemeliharaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan Rusunawa dapat menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih nyaman dan layak huni bagi seluruh penghuni.

Keywords:

Rusunawa, Efektivitas Pengelolaan, Kepuasan Penghuni

Pendahuluan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan menjadi landasan segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang layak dan aman sangatlah penting. Dalam konteks

nasional, penyediaan perumahan yang layak diwajibkan oleh undang-undang dan merupakan tanggung jawab lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, pentingnya mandat ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang ini mensyaratkan bahwa perumahan yang disediakan oleh pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat, termasuk aspek lingkungan hidup yang layak, sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Selain menyediakan perumahan dan kawasan pemukiman, pemerintah juga berperan penting dalam menyediakan perumahan melalui konsep apartemen. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Apartemen. Negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menyediakan perumahan yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (selanjutnya disebut MBR), melalui Program Pengelolaan Apartemen. Program ini berfokus pada MBR sebagai langkah nyata pemerintah untuk membantu masyarakat dengan daya beli terbatas mendapatkan hunian layak melalui apartemen. Hal ini sesuai dengan prinsip kesejahteraan, keadilan, keterjangkauan, kemudahan, kemandirian, keramahan, kesehatan, keberlanjutan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Analisis data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram mengenai angka kemiskinan di Kota Mataram periode 2014 hingga 2023 menunjukkan adanya fluktuasi jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin tertinggi tercatat sebanyak 46.760 jiwa. Jumlah terendah tercatat pada tahun 2020 sebanyak 41.800 orang. Selain itu, jumlah penduduk miskin akan meningkat pada tahun 2021 hingga tahun 2023, pada tahun 2023 jumlahnya akan mencapai 46.210 jiwa (<https://mataramkota.bps.go.id/>). Dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan, terutama karena menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram diperkirakan menghadapi proyeksi peningkatan jumlah MBR. Dengan terbatasnya lahan yang tersedia, kebutuhan akan perumahan yang terjangkau merupakan isu penting yang perlu dikelola.

Pentingnya perumahan bagi MBR tidak hanya terletak pada penyediaannya saja, namun juga cara pemerintah mengelolanya dengan memperhatikan kebutuhan, kebutuhan dan kenyamanan penghuni khususnya MBR. Hal ini mencakup aspek kualitas bangunan, sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang menunjang aktivitas penghuni. Selain itu, perawatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengoperasian yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa bangunan dan fasilitas terus beroperasi secara efisien. Semua faktor tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kebahagiaan, kenyamanan dan kepuasan penghuni apartemen.

Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) telah menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Sebagai solusi perumahan terjangkau, Rusunawa tidak hanya menyediakan hunian namun juga berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan kota. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dinas Perumahan dan Permukiman terutama bertanggung jawab atas pengelolaan Rusunawa, memastikan bahwa fasilitas tersebut beroperasi secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan Rusunawa mencakup berbagai aspek, antara lain pemeliharaan bangunan, pengelolaan operasional, penyediaan fasilitas umum, dan pelayanan sosial kepada warga.

Pengelolaan Rusunawa yang efektif adalah kunci untuk menjamin keberlanjutan program perumahan ini dan meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Meskipun Rusunawa telah memberikan kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan perumahan di NTB, penilaian menyeluruh terhadap praktik pengelolaan saat ini masih diperlukan untuk mengidentifikasi bidang-bidang perbaikan yang dapat dilakukan.

Pemeriksaan dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan Rusunawa berjalan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tetapi juga akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk Rusunawa digunakan secara efektif untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat Rusunawa dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menjawab kebutuhan mereka secara tepat dan efektif. Dengan demikian, Rusunawa dapat terus menjadi solusi berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan Rusunawa merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan fasilitas sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, pengelola Rusunawa dan masyarakat setempat, dapat dipastikan bahwa fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui kerja sama yang erat, berbagai inisiatif dapat dilaksanakan, mulai dari pengembangan usaha kecil dan mikro di Rusunawa, pelatihan kejuruan bagi masyarakat, hingga penyediaan fasilitas pertemuan Komunitas dan acara sosial. Dengan begitu, Rusunawa tidak hanya menjadi tempat tinggal, namun juga membangun masyarakat yang kuat dan mandiri

secara ekonomi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rusunawa tetapi juga akan memberikan dampak positif yang luas terhadap kemajuan sosial-ekonomi wilayah tersebut secara keseluruhan. Kestinambungan ini merupakan hasil komitmen bersama dalam memanfaatkan Rusunawa sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan adanya program mahasiswa magang di Dinas Perumahan dan permukiman provinsi nusa tenggara barat. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari 18 Januari 2024 S/D 26 Maret 2024. Adanya program ini juga melibatkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah mataram dan dosen pembimbing lapangan. Dalam melaksanakan program ada 3 tahapan yang di lakukan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini

Tahap pertama perencanaan ini mahasiswa berkoordinasi dalam pihak instansi untuk menentukan jenis kegiatan pengamatan, sarana dan prasarana yang ada di tempat yang ditentukan.

Tahap kedua:

- 1) Mahasiswa mengamati kualitas pelayanan untuk memastikan bahwa instansi di tempat tersebut mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat.
- 2) Mahasiswa mengamati kegiatan pegawai dalam bekerja sama untuk kemajuan dan siap melayani Masyarakat dengan baik.

Tahap ketiga evaluasi, mahasiswa mengevaluasi pelaksanaan pengabdian supaya lebih berkembang dengan baik.



Gambar 1. Penulis, Noval Kurniawan S.H dan Hasbi Jauhari S.T., M.T

Hasil

Berisi Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat. Evaluasi ini mencakup aspek-aspek operasional, kepuasan penghuni, serta pemeliharaan dan perawatan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei terhadap penghuni Rusunawa dan wawancara dengan pengelola.

1. Operasional Pengelolaan Rusunawa

Penelitian menemukan bahwa secara umum, operasional pengelolaan Rusunawa berjalan cukup baik. Sistem administrasi yang diterapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menggunakan teknologi informasi yang memadai. Pendaftaran, pembayaran sewa, serta penanganan keluhan dilakukan secara digital, yang memudahkan proses pengelolaan dan pengawasan. Namun, beberapa penghuni melaporkan bahwa masih terdapat kendala dalam sistem tersebut, terutama dalam hal pemrosesan keluhan yang terkadang memakan waktu lama.

2. Kepuasan Penghuni

Tingkat kepuasan penghuni menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan Rusunawa. Berdasarkan survei yang

dilakukan, mayoritas penghuni merasa cukup puas dengan fasilitas yang disediakan, seperti kebersihan lingkungan, keamanan, dan fasilitas umum seperti taman bermain dan tempat parkir. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain:

- a) Ketersediaan Air Bersih: Sebagian penghuni mengeluhkan ketersediaan air bersih yang sering kali terganggu, terutama pada musim kemarau.
- b) Pemeliharaan Fasilitas: Beberapa fasilitas umum seperti lift dan tangga darurat memerlukan perawatan lebih lanjut untuk memastikan keselamatan penghuni.
- c) Layanan Responsif: Penghuni mengharapkan adanya peningkatan dalam respons pengelola terhadap keluhan dan permintaan perbaikan.

3. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan

Pemeliharaan dan perawatan bangunan adalah aspek krusial dalam pengelolaan Rusunawa. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tim pemeliharaan yang bertanggung jawab untuk memastikan kondisi bangunan tetap baik dan layak huni. Namun, penelitian ini menemukan beberapa tantangan dalam aspek ini:

- a) Anggaran Pemeliharaan: Anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan sering kali tidak mencukupi untuk menutupi semua kebutuhan perawatan, terutama untuk perbaikan besar dan mendesak.
- b) Ketersediaan Sumber Daya: Keterbatasan tenaga kerja dan sumber daya material mengakibatkan beberapa pekerjaan pemeliharaan tertunda.
- c) Pelatihan Staf: Staf pemeliharaan memerlukan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani berbagai masalah teknis yang mungkin timbul.

Secara umum, operasional pengelolaan Rusunawa di bawah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat berjalan cukup baik. Sistem administrasi yang diterapkan telah menggunakan teknologi informasi yang memadai, di mana pendaftaran, pembayaran sewa, dan penanganan keluhan dilakukan secara digital. Namun, beberapa penghuni melaporkan adanya kendala dalam sistem ini, terutama dalam hal pemrosesan keluhan yang sering kali memakan waktu lama.

1. Temuan utama:

- a) Administrasi Digital: Sistem administrasi digital memudahkan proses pendaftaran dan pembayaran sewa. Namun, masih terdapat hambatan teknis seperti server yang sering down dan user interface yang kurang intuitif.
- b) Pengelolaan Keluhan: Proses penanganan keluhan sering kali lambat, mengakibatkan ketidakpuasan penghuni. Beberapa keluhan yang umum meliputi gangguan pada fasilitas umum seperti lift dan tangga darurat.

2. Kepuasan Penghuni

Kepuasan penghuni merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan Rusunawa. Berdasarkan survei, mayoritas penghuni merasa cukup puas dengan fasilitas yang disediakan, termasuk kebersihan lingkungan, keamanan, dan fasilitas umum seperti taman bermain dan tempat parkir. Namun, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan:

Temuan utama:

- a) Ketersediaan Air Bersih: Sebagian besar penghuni mengeluhkan ketersediaan air bersih yang sering terganggu, terutama pada musim kemarau.
- b) Pemeliharaan Fasilitas: Beberapa fasilitas umum memerlukan perawatan lebih lanjut. Lift sering kali rusak dan tangga darurat tidak selalu dalam kondisi optimal.
- c) Layanan Responsif: Penghuni mengharapkan peningkatan dalam respons pengelola terhadap keluhan dan permintaan perbaikan.

3. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan

Pemeliharaan dan perawatan bangunan adalah aspek krusial dalam pengelolaan Rusunawa. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tim pemeliharaan yang bertanggung jawab untuk memastikan kondisi bangunan tetap baik dan layak huni. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam aspek ini:

Temuan utama:

- a) Anggaran Pemeliharaan: Anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan sering kali tidak mencukupi untuk menutupi semua kebutuhan perawatan, terutama untuk perbaikan besar dan mendesak.
- b) Ketersediaan Sumber Daya: Keterbatasan tenaga kerja dan sumber

daya material mengakibatkan beberapa pekerjaan pemeliharaan tertunda.

- c) Pelatihan Staf: Staf pemeliharaan memerlukan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani berbagai masalah teknis yang mungkin timbul.

Efektivitas pengelola Rusunawa di bawah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat masih memerlukan peningkatan di beberapa aspek. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut terkait temuan-temuan tersebut:

1. Perbaiki Sistem Administrasi dan Teknologi Informasi

Meskipun sistem administrasi digital telah diterapkan, perlu adanya peningkatan dalam hal user experience dan kecepatan respons terhadap keluhan penghuni. Implementasi aplikasi mobile yang lebih user-friendly dan peningkatan kapasitas server dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

Rekomendasi:

- a) Pengembangan Aplikasi Mobile: Aplikasi mobile yang intuitif dan mudah digunakan dapat membantu penghuni dalam mengakses layanan administrasi dan melaporkan keluhan dengan lebih cepat.
- b) Peningkatan Kapasitas Server: Peningkatan kapasitas server dapat mengurangi masalah teknis seperti server down dan memastikan sistem administrasi dapat berjalan lancar.

2. Peningkatan Layanan Penghuni

Untuk meningkatkan kepuasan penghuni, pengelola Rusunawa perlu melakukan survei berkala untuk memahami kebutuhan dan keluhan penghuni secara lebih mendalam. Penyediaan air bersih yang konsisten dan peningkatan layanan perawatan fasilitas umum harus menjadi prioritas. Selain itu, pelatihan bagi staf pengelola agar lebih responsif dalam menangani keluhan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan penghuni.

Rekomendasi:

- a) Survei Berkala: Melakukan survei berkala untuk mengetahui kebutuhan dan keluhan penghuni dapat membantu pengelola dalam merespons dengan cepat dan tepat.
- b) Peningkatan Layanan Air Bersih: Investasi dalam infrastruktur air bersih dan kerjasama dengan penyedia air lokal dapat memastikan ketersediaan air yang konsisten.

- c) Pelatihan Staf: Pelatihan berkala bagi staf pengelola mengenai teknik-teknik responsif dalam menangani keluhan penghuni dapat meningkatkan kualitas layanan.

3. Optimalisasi Anggaran dan Sumber Daya

Pengelolaan anggaran yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup bagi pemeliharaan dan perawatan bangunan. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mencari alternatif pendanaan, seperti melalui kerjasama dengan sektor swasta atau memanfaatkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.

Rekomendasi:

- a) Pengelolaan Anggaran: Pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efisien dapat memastikan dana yang tersedia digunakan dengan tepat sasaran.
- b) Alternatif Pendanaan: Kerjasama dengan sektor swasta atau memanfaatkan dana CSR dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam pemeliharaan Rusunawa.

4. Pelatihan dan Pengembangan Staf

Pelatihan bagi staf pemeliharaan sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan bangunan. Pelatihan berkala tentang teknik perawatan terbaru, penggunaan alat-alat modern, dan manajemen proyek dapat membantu staf dalam menangani masalah teknis dengan lebih efektif dan efisien.

Rekomendasi:

- a) Pelatihan Berkala: Menyediakan pelatihan berkala bagi staf pemeliharaan tentang teknik-teknik terbaru dan penggunaan alat modern dapat meningkatkan keterampilan mereka.
- b) Manajemen Proyek: Pelatihan tentang manajemen proyek dapat membantu staf dalam merencanakan dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dengan lebih efisien.

5. Partisipasi Penghuni dalam Pemeliharaan

Melibatkan penghuni dalam program pemeliharaan bangunan juga dapat menjadi strategi yang efektif. Penghuni dapat dilibatkan dalam kegiatan kebersihan lingkungan dan pemeliharaan fasilitas umum melalui program gotong royong atau komunitas penghuni. Hal ini tidak hanya akan mengurangi beban kerja pengelola, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab penghuni terhadap lingkungan tempat

tinggal mereka.

Rekomendasi:

- a) Program Gotong Royong: Mengadakan program gotong royong secara rutin dapat melibatkan penghuni dalam menjaga kebersihan dan pemeliharaan lingkungan Rusunawa.
- b) Komunitas Penghuni: Membentuk komunitas penghuni yang aktif dapat membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan dan kebersihan secara mandiri.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan Rusunawa oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berjalan cukup baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Perbaikan sistem administrasi dan teknologi informasi, peningkatan layanan penghuni, optimalisasi anggaran dan sumber daya, serta pelatihan dan pengembangan staf merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Melibatkan penghuni dalam program pemeliharaan juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam menciptakan lingkungan Rusunawa yang lebih nyaman dan layak huni. Memiliki beberapa implikasi kebijakan yang penting bagi pemerintah daerah dan pengelola Rusunawa. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan meliputi: Diperlukan adanya kebijakan pengelolaan Rusunawa yang terpadu dan komprehensif, mencakup semua aspek pengelolaan mulai dari administrasi, pemeliharaan, hingga partisipasi

Diskusi

Mengenai magang yang dilaksanakan Mahasiswa Muhammadiyah Di Dinas Perumahan Dan Permukiman sangat berkesan dan bermanfaat untuk ilmu dan pengalaman yang di beri oleh staff di Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Yang menjadi hambatan dalam kegiatan magang ini adalah kurangnya data data masyarakat yang ingin menempati rumah susun sederhana sewa sehingga terjadi keterlambatan dalam Melengkapi data yang menjadi pelengkap sebagai persyaratan untuk menempati rumah susun sederhana sewa.

Kesimpulan

Berisi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah

satu upaya strategis untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Efektivitas pengelolaan ini dapat diukur melalui beberapa indikator kunci, seperti keterjangkauan biaya sewa, kondisi fisik bangunan, serta tingkat kepuasan penghuni.

Pertama, keterjangkauan biaya sewa merupakan faktor penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan Rusunawa. Dinas Perumahan dan Permukiman NTB berhasil menetapkan tarif sewa yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat sasaran, sehingga Rusunawa dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan. Hal ini membantu mengurangi beban biaya hunian yang sering kali menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kedua, kondisi fisik bangunan juga menjadi indikator penting. Dinas Perumahan dan Permukiman NTB berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas bangunan melalui pemeliharaan rutin dan perbaikan berkala. Langkah ini penting untuk memastikan Rusunawa tetap aman dan nyaman untuk ditinggali, serta dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Ketiga, tingkat kepuasan penghuni mencerminkan keberhasilan pengelolaan Rusunawa. Berdasarkan survei dan feedback dari penghuni, dapat dilihat bahwa sebagian besar penghuni merasa puas dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman NTB berhasil mengelola Rusunawa dengan baik, sehingga penghuni merasa nyaman dan terbantu. Secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan Rusunawa di Provinsi NTB oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dapat dikatakan cukup baik. Dengan biaya sewa yang terjangkau, kondisi fisik bangunan yang terjaga, serta tingkat kepuasan penghuni yang tinggi, program ini berhasil memenuhi tujuan utamanya yaitu menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pengakuan/Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu nurul hidayatiin selaku dosen pembimbing yang sudah membantu dan memberi arahan sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih juga kepada dinas perumahan dan permukiman provinsi nusa tenggara barat yang telah menerima kami dalam melaksanakan kegiatan magang dan memberi ilmu dan pengalaman yang sangat berkesan. Terima kasih juga kepada rekan magang saya yang berjuang dan ikhlas menyelesaikan penulisan ini.

Daftar Referensi

<https://mataramkota.bps.go.id>

Paunno, D. A. R. (2020). LANDASAN KONSEPTUAL PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR KAMPUNG VERTIKAL DI KOTA BOGOR DENGAN PENDEKATAN BIOPHILIC (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Simbolon, S. C., & Santoso, R. S. (2020). EVALUASI KEBIJAKAN PENGHUNIAN DAN PENYEWAAN RUMAH SUSUN BANDARHARJO KOTA SEMARANG/91/ADM. PUBLIK/2020 (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).

WIRDIANTO, D. (2022). Perbandingan Efektivitas Rumah Susun Gemawang Dan Rumah Susun Jongke Dengan Hunian Horizontal Dalam Menyelesaikan Permasalahan Hunian.